

PELAYANAN PENDIDIKAN KEGAMAAN KOMUNITAS MUSLIM MINORITAS DI BALI

Ta'rif

Abstract

This article depicts the implementation of religious educational service in minority society --involving the form and kinds of religious educational service given by minority society, the obstacles of its establishment and also its expectation to religious education in minority society. By taking a case in Tabanan, it is found that religious educational service in the region can't be aparted from participation of Moslem minority, All minority muslim society has been serve, since teenager to adult. Though in the limited equipment and the low prosperivity of teachers, the muslim is still learn Islam in high spirit.

Keywords: *religious educational service, minority society*

I. Pendahuluan

Pelayanan negara terhadap rakyatnya dalam bentuk layanan pendidikan sudah dirancang sangat optimal, tidak saja mendorong peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang cerdas, kreatif dan dinamis, tapi juga diharapkan mereka menjadi manusia yang memiliki integritas keimanan dengan konsistensi artikulasi ketaqwaan yang kuat. Negara juga telah memfasilitasi agar semua warga negara memperoleh layanan pendidikan agama yang diberikan guru yang seagama. Bersamaan dengan itu, negara memfasilitasi rakyatnya

Ta'rif, M.Ag adalah Peneliti
Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan - Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI

untuk mempelajari agama secara mendalam melalui pendidikan keagamaan, sehingga tidak saja cukup untuk membekali diri mereka dalam upaya mencapai kualifikasi ketaqwaannya yang ideal, tapi juga bisa menjadi ahli agama yang dapat memberikan layanan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan keagamaan kepada masyarakat melalui pendidikan non formal sebagai wujud dari prinsip pendidikan sepanjang hayat.¹

Persoalan pelayanan pendidikan (agama dan keagamaan) akan melibatkan banyak unsur dimana satu sama lainnya harus bisa memiliki pemahaman yang sama. Unsur-unsur besar yang masih belum padu adalah Pemerintah Daerah, Departemen Agama dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pemerintah Daerah memiliki tugas menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.² Dan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan pendidikan. Kenyataannya, belum semua Pemerintah Daerah bisa berlaku adil dalam urusan pendidikan terutama pendidikan agama dan keagamaan. Bahkan terjadi diskriminasi yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan.³ Perdebatan terakhir berkaitan dengan diskriminasi pendidikan keagamaan adalah diberlakukannya Surat Edaran Mendagri Nomor : 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2006, tertanggal, 21 Setember 2005. Terdapat pernyataan yang memperkuat diskriminasi tersebut yakni pada lampiran II SE tersebut. Dikatakan bahwa "Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengalokasian anggaran APBD yang diperuntukkan membantu institusi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah tidak diperbolehkan". Padahal, lembaga pendidikan keagamaan berhubungan secara vertikal dengan Departemen Agama.⁴ Ini artinya pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengalokasikan anggarannya untuk lembaga pendidikan keagamaan.

¹ Pasal 12 (1) dan Pasal 30 (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

² Undang Undang No. 32 (2) Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Untuk urusan wajib Pemerintah Daerah, lihat pasal 13 dan 14.

³ Lihat Husni Rahim. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Logos, hh. 50-51. Kutipan ini untuk menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan sejak zaman penjajahan tidak pernah mendapat bantuan, malah selalu diawasi dan dihambat perkembangannya, sebagaimana tertuang dalam Ordonansi Guru th. 1905 No. 550, dan Ordonansi Guru th. 1925.

⁴ Ahmad Choirul Fata. 2006. "Anak Tiri itu Bernama Madrasah," *Republika*, 13 Februari.

Indonesia merupakan sebuah negara multi etnis, multi bahasa, multi budaya dan multi agama. Dari sisi etnis terdapat kurang lebih 1000 etnis atau sub etnis tersebar di wilayah Indonesia ini.⁵ Terdapat lima agama yang diakui negara sebagai agama resmi (dan masih banyak lagi agama-agama yang belum diakui negara), juga menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Demikian halnya dengan keanekaragaman bahasa dan budayanya. Keadaan ini harus disadari menyimpan potensi besar timbulnya pertentangan satu sama lain. Secara kuantitatif antar etnis, bahasa, budaya dan agama juga tidak imbang yang kemudian memunculkan apa yang disebut mayoritas-minoritas. Penyebaran yang tidak imbang tersebut mempunyai implikasi terhadap pemerataan pendidikan.

Masalah mayoritas dan minoritas di Indonesia masih berkisar pada masalah bagaimana perlakuan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat sekitar (warga mayoritas) terhadap komunitas minoritas yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada komunitas muslim minoritas di Kec. Kediri Kab. Tabanan Bali, untuk mengetahui sejauhmana implementasi pelayanan pendidikan keagamaan minoritas muslim di Tabanan, bentuk-bentuk pelayanan pendidikan keagamaan yang diberikan, serta hambatan dan harapan masyarakat tentang pendidikan keagamaan bagi masyarakat minoritas muslim di Tabanan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Departemen Agama (Kabid PK Pontren Kanwil Bali, Kasi PK Pontren dan Urais Kab. Tabanan, KUA Kec. Kediri), tokoh masyarakat (Ormas Islam NU, MUI, Muhammadiyah), orang tua murid/santri, pimpinan lembaga pesantren dan Madrasah Diniyah), observasi lapangan dan studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan dengan cara mendalami dan menginterpretasikan fenomena yang bisa dicatat yang bersumber dari tindakan dan perkataan dari obyek penelitian. Langkah yang ditempuh adalah dengan mengorganisasi data dari hasil catatan lapangan baik yang bersumber dari data sekunder (daftar isian), data primer (hasil wawancara dan observasi) dan dokumen-dokumen (dari studi kepustakaan).

⁵ M Ainul Yaqin. 2005. *Pendidikan Multi Kultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta : Pilar Media, h. 206.

II. Landasan Konseptual

Menurut Azra studi tentang masyarakat minoritas-mayoritas sebenarnya telah dilakukan sejak dekade 1950-an dan 1960-an. Pada dekade 1950-an, perhatian diawali adanya ketertarikan para ahli politik di Barat untuk mulai meneliti pengaruh formasi negara bangsa di negara-negara yang baru merdeka terhadap pergeseran dan pengelompokan etnik di wilayah geografisnya. Pada tahun 1960-an, muncul negara-negara baru merdeka dimana isu-isu nasionalisme begitu didengarkan. Isu ini (nasionalisme) sekaligus menggerogoti identitas etnis, ras dan bahkan agama di masing-masing negara baru itu. Proses ini oleh Azyumardi azra disebut sebagai pembongkaran batas-batas etnis oleh nasionalisme dan regionalisasi yang membentuk negara bangsa yang akhirnya memicu lahirnya golongan mayoritas dan minoritas.⁶

Studi M Ali Kettani barangkali merupakan studi paling komprehensif berkaitan dengan tema Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini. Studi ini dilakukan di berbagai Negara seperti Eropa, Uni Soviet, China, India, Afrika, Amerika, Pasifik dan di bagian Asia lainnya. Kettani mendefinisikan minoritas dikaitkan dengan istilah muslim, sehingga minoritas muslim adalah bagian penduduk yang berbeda dari penduduk lainnya karena anggota-anggotanya mengakui Muhammad, putra Abdullah, menjadi utusan Allah terakhir dan meyakini ajarannya adalah benar, dan yang sering mendapat perlakuan berbeda dari orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan seperti itu.⁷

Mason memaknai kelompok minoritas dilihat dari segi jumlah yang relatif kecil. Minoritas ditandai dengan angka, suara politik dan moral sehingga ini semua menyebabkan berkurangnya pengaruh terhadap keputusan mayoritas.⁸

Pelayanan pendidikan pada hakekatnya sama dengan pelayanan pada umumnya. Pelayanan pada hakekatnya merupakan sebuah pekerjaan; yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Ada juga yang

⁶ Azyumardi Azra. 2005. *Wacana tentang Minoritas Muslim*, dalam Kata Pengantar Buku M. Ali Kettani. 2005. *Minoritas di Dunia Dewasa ini*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. xx

⁷ M. Ali Kettani. 2005. *Muslim Minoritas di Dunia Dewasa ini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 3

⁸ Sebagaimana dikutip dalam Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI (2005), *Studi Kelompok Keagamaan Minoritas di Berbagai Daerah*, h. 4.

memberi makna kegiatan melaksanakan tugas untuk membantu orang lain. Maka, kemudian, layanan dibedakan dengan produk, dimana produk mengacu pada out-put seperti barang. Sementara pelayanan mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan untuk menghasilkan produk atau perilaku penyedia layanan, yang berkaitan dengan sikap melayani seperti; memberi saran/informasi atau melayani pengobatan pasien. Dengan demikian, pelayanan merupakan dukungan yang diberikan bagi optimalisasi produk, perbantuan bagi pelanggan atau pengerjaan tugas lapangan.

Menurut Parasuraman, terdapat lima kriteria untuk menilai apakah kualitas layanan dapat disebut baik atau tidak. Yaitu (1) kekonkretan, yang menyangkut fasilitas fisik, perlengkapan, petugas dan sarana komunikasi (2) keterandalan, berkaitan dengan kemampuan dan ketepatan dalam memberikan layanan sesuai dengan apa yang dijanjikan, (3) tanggap, yaitu kesigapan dan kecepatan petugas dalam memberikan layanan, (4) jaminan, yakni layanan yang mampu memberikan kepastian keamanan, kebebasan dari mara bahaya dan resiko lainnya, (5) empati, yakni memberikan kemudahan komunikasi, memberi perhatian (secara) pribadi serta memahami petugas terhadap kebutuhan pelanggan.⁹

Pengertian minoritas dalam penelitian ini dibatasi dalam pengertian jumlah (kuantitas). Artinya, penelitian dilakukan pada lingkungan masyarakat muslim yang secara kuantitas lebih kecil dibanding komunitas agama lain. Sedangkan pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep yang dipergunakan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 30 ayat (4) bahwa pendidikan keagamaan berbentuk *pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbaja samanera* dan bentuk lain yang sejenis. Karena penelitian ini belum bisa mencakup seluruh agama, maka pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah diniyah dan pesantren.

III. Tabanan sebagai Potret Minoritas Muslim

Berdasarkan data sensus BPS tahun 2004, jumlah penduduk kabupaten Tabanan sebanyak 397.673 jiwa, terdiri 197.122 jiwa penduduk laki-laki dan 200.551 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah penganut menurut agama, sebagian besar penduduknya beragama Hindu yaitu 97,3 %. Kemudian disusul agama Islam sebanyak 1,93 % , Budha (0,3 %) ,

⁹*ibid.*

Protestan (0,23 %) dan terakhir agama Katolik (0,16 %). Untuk mendukung pelayanan umat beragama di Kabupaten Tabanan, terdapat sarana tempat ibadah yaitu sebanyak 1.129 buah tempat peribadatan umat Hindu (Pura), 43 buah peribadatan umat Islam, 4 buah untuk umat Katolik, 2 buah untuk agama Budha dan 9 buah untuk peribadatan agama Protestan.

Jumlah lembaga pendidikan umum di Kabupaten Tabanan meliputi: 186 buah Taman Kanak-Kanak (TK), 334 buah Sekolah Dasar (SD). SLTP jumlah murid sebanyak 14.924. Tingkat SMU/SMK terdapat 15.003 orang. Dan tiga PT swasta yaitu Universitas Tabanan, IKIP Saraswati Tabanan dan STISIP Margarana Tabanan.

Untuk lembaga pendidikan Islam (madrasah) umumnya dikelola oleh swasta. Jumlah lembaga pendidikan agama (madrasah) di Kabupaten Tabanan terdiri dari: 5 buah RA/BA dengan murid sebanyak 208 siswa, 2 buah MI dengan 445 murid, 3 buah MTs dengan 254 murid, dan 1 buah Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan Madrasah Diniyah Awaliyah sebanyak 18 buah dengan 963 santri dan 65 guru. Madrasah Diniyah Wustha (MDW) sebanyak 4 buah dengan 15 santri. Sedangkan pondok pesantren sebanyak 5 buah dengan 339 santri dan 23 tenaga guru/ustadz.

Islam di Bali tidak lepas dari sejarah dan perkembangannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Islam masuk ke Bali terjadi pada abad XIV, tepatnya di wilayah Gelgel, Klungkung (pusat kerajaan Bali sejak abad XIV) bersamaan dengan kedatangan orang Islam yang mengaku sebagai penggiring "Dalem dari Majapahit". Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, raja Gelgel kedua (1480-1550 M), terjadi pengislaman oleh para pedagang dari Gujarat. Dari pusat kerajaan Gelgel inilah kemudian Islam berkembang di seluruh Bali (abad XVII-XX). Di antaranya, dari Gelgel Islam berkembang ke Kampung Lebah dan Kampung Jawa di Kecamatan Klungkung, Kampung Kusamba di Kecamatan Dawan, dan Toyapakeh, Nusa Penida. Tidak berbeda dengan di Klungkung, di Badung Islam masuk berawal dari Anak Agung Ayu Rai bertolak ke tanah Jawa dengan penggiring-penggiringnya, sekembalinya dari Jawa para penggiring ini telah memeluk agama Islam.

Selanjutnya Islam mulai berkembang pada masa pemerintahan Cokorda Pemecutan III (sekitar tahun 1669 M). Hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak kerajaan Pemecutan dan para saudagar dari Bugis Makasar di Jembrana merupakan bagian dari fakta sejarah yang

berpengaruh terhadap perkembangan Islam di kabupaten Badung. Diantara mereka adalah orang Islam Bugis yang bermukim di Serangan. Selain itu, bangsawan Madura Raden Sosroningrat yang telah menjadi keluarga Puri Pemecutan juga menjadi cikal bakal Islam di Badung dan kota Denpasar. Kampung Kepaon, Petang, dan kampung Jawa menjadi kawasan konsentrasi Islam. Selain orang Bugis, di Petang dihuni oleh suku Sasak.¹⁰

Di Kabupaten Tabanan, Islam diperkirakan mulai berkembang pada masa pemerintahan raja Betara Ngeluhur (1808). Pembawa Islam pertama ke Tabanan diprediksi adalah orang biasa yang karena jasanya menterjemahkan surat dari bahasa Jawa ia beri anugerah oleh raja Batara Ngluhur (?) kemudian dijadikan juru bahasa istana. Pemuda itu bernama Aryo Nur Alam, kelak kawin dengan seorang gadis Bali, memperoleh keturunan bernama Raden Mustofa, yang kemudian menurunkan Raden Saleh. Sejak itu beserta istrinya dan anak cucunya dianggap orang – orang yang menyampaikan ajaran Islam di Tabanan. Makamnya ada di Tabanan dengan batu nisan bertarikh wafatnya tahun 1284 H atau tahun 1873 M. Seandainya ia berumur 8 tahun maka diperkirakan ia dilahirkan pada tahun 1793 M, dan seandainya ia sangat muda, kira-kira baru umur 15 tahun waktu datan ke Tabanan, maka kedatangannya di Tabanan sekitar tahun 1808 M. jadi masuknya Islam ke Tabanan kira-kira pada awal abad ke 19 M. itulah-satu-satunya sumber sejarah tentang masuknya Islam di Kab. Tabanan.¹¹

Hal yang perlu dicatat di sini adalah pola perkembangan Islam di Bali yang prosesnya berlangsung secara adaptif. Islam masuk ke Bali melalui jalan damai karenanya umat Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan struktur kehidupan masyarakat Bali yang mayoritas menganut Hindu. Hubungan umat Islam dan umat Hindu Bali berlangsung secara harmonis. Hal ini menurut sesepuh umat Islam Bali, KH HS Habib Adnan, ada empat faktor yang menyebabkan Islam dapat berkembang di Bali. Pertama, adanya kesamaan model Islam Bali dan Hindu Bali yang khas Indonesia. Kedua, para penyebar

¹⁰ Lihat: H. Shaleh Saidi dan Drs. Yahya Anshori (peny.) 1979. *Sejarah Keberadaan Ummat Islam di Bali*. Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan MUI propinsi Bali bekerjasama dengan Pemda Tk. I Bali.

¹¹ HM Shaleh Saidi. 1966. "Perkembangan Akulturasi Islam dan Hindu di Bali," dalam Aswab Mahasin (ed.). *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa*. Jakarta: Yayasan Festival Jakarta, h. 253

Islam di Bali cenderung menyebarkan Islam secara persuasif dan humanis. Ketiga, sejak zaman kerajaan dulu tidak terjadi konflik antara kerajaan-kerajaan Jawa dan Bali. Keempat, adanya kemiripan antara umat Islam dan umat Hindu di Bali dalam cara pandang kulturalnya.

IV. Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kediri Tabanan:

A. Pondok Pesantren Roudlatul Huffadz

Pondok Pesantren Roudlotul Huffadz terletak di Jl. Banjar Baru Taman Surodadi Desa Abian Tuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Propinsi Bali. Pesantren didirikan pada tahun 1980 M /1401 H oleh KH Noor Hadi alumni Pesantren Tahfidzul Qur'an Yanbaul Qur'an Kudus Jawa Tengah. Ia murid langsung dari Kyai Arwani Kudus (seorang ulama tahfidz al-Qur'an). Sesuai dengan namanya *Roudlotul Huffadz*, pesantren ini oleh para pendirinya diharapkan menjadi tempat taman atau kebun yang akan melahirkan para penghafal/huffadz al-Qur'an.

Secara kelembagaan, pesantren Roudlotul Huffadz menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Non Formal dengan jenjang pendidikan tingkat Ula dan Wustha. Sedangkan ciri khas sistem pembelajarannya melalui pengajian kitab salafi dengan menggunakan metode sorogan dan tahfidz /hafalan al-Qur'an.

Santri yang menempuh pendidikan tahfidz dan berhasil menghatamkan al-Qur'an 30 Juz, berhak mendapatkan Syahadah Tahfidz Qur'an dari PP. Roudlotul Huffadz. Sertifikat tersebut mendapatkan pengakuan/*mu'adalah* dari PP. Yanbaul Qur'an Kudus Jawa Tengah, pimp. almarhum KH. Arwani, karena KH. Noor Hadi sendiri merupakan murid langsung dari KH Arwani Kudus. Dengan demikian, lulusan alumni atau tamataan PP Roudlotul Huffadz sama dengan PP. Yanbaul Qur'an di Kudus.

Jumlah santri PP Roudlatul Huffadz sebanyak 104 orang, berasal dari Kabupaten Tabanan dan kabupaten lain di Propinsi Bali. Santri yang berasal dari luar Propinsi Bali bahkan lebih banyak dibandingkan dengan santri dari propinsi Bali. Jumlah santri yang hanya belajar di Diniyah di pondok pesantren adalah sebanyak 68 santri, sedangkan santri yang hanya belajar mengaji saja berjumlah 37 santri.

Dari segi ketenagaan, jumlah personil yang terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar berjumlah 18 orang, terdiri dari : kyai satu orang, nyai 1 orang, badal kyai 1 orang, ustadz 8 orang, ustadzah 3 orang, tata usaha 2 orang, dan keamanan/pesuruh sebanyak 1 orang.

Latar belakang pendidikan masing-masing adalah tamatan setingkat SLTA sebanyak 6 orang dan sarjana S1 sebanyak 11 orang. Hampir seluruhnya; 16 orang adalah non PNS dan hanya satu orang PNS.

Lokasi pesantren menempati lahan seluas 1.500 m². Sarana prasana yang dimiliki antara lain; asrama putera dengan luas 260 meter persegi, asrama puteri 240 meter persegi, ruang belajar 120 meter, ruang Kyai 36 meter, masjid/mushalla 36 meter, aula/serbaguna 48 meter, ruang kegiatan santri 48 meter, WC Ustadz 12 meter, WC santri 10 meter. Dari sarana tersebut diatas kondisi ruangan/bangunan semuanya baik. Sedangkan sarana yang belum dimiliki pesantren adalah ruang guru dan perpustakaan yang sementara ini masih menempati rumah pimpinan pesantren (KH Noor Hadi).

Proses belajar mengajar dilaksanakan setiap hari, kecuali hari jum'at, semua aktifitas diliburkan dan diganti dengan kegiatan pembacaan surat yasin dan tahlil sesudah shalat magrib, pembacaan diba'an setelah shalat Isha, pembacaan surat Yasin, al-Waqiah dan al-Mulk setelah Shalat shubuh dan kegiatan tadarus al-Qur'an bersama setelah shalat Jum'at. Kegiatan harian ini dimulai dari pukul 04.00 sampai jam 21.30 WITA. Selain itu terdapat juga kegiatan ekstrakurikuler seperti karate dan qasidah yang dilakukakan pada hari Sabtu dan Selasa.

Pesantren Roudlotul Huffadz memiliki sejumlah potensi yang dapat terus dikembangkan baik dari segi keilmuan maupun ketrampilan, di antara potensi bidang keilmuan adalah pendalaman ilmu-ilmu agama terutama bidang pembinaan tahfidz al-Qur'an yang menjadi *trade make* pesantren ini. *Kedua*, pendalaman kitab-kitab kuning. Dalam bidang keterampilan, potensi yang dikembangkan di antaranya; bidang perbengkelan otomotif, komputer, seni kaligrafi dan potensi ekonomi berupa industri kecil (jasa) yaitu penggilingan baso.

B. Madrasah Diniyah Miftahul Huda

Madrasah Diniyah Miftahul Huda didirikan tahun 1979 dengan dimotori para tokoh masyarakat Kediri, di antaranya KH Noor Hadi Ust. Sonhadji, H. Sohib (pensiunan Kandepag Kab. Tabanan) dan Rohadi Adib.

MD Miftahul Huda terletak di jalan raya Kediri Tabanan tepatnya di Jalan A. Yani Gg. Kamboja I Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (sekitar 5 Km dari Kota Tabanan). Didirikan oleh sebuah badan yang bernama Pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Huda. Sistem pengelolaan

MD Miftahul Huda berada di luar pondok pesantren dengan sistem berjenjang. MD Miftahul Huda merupakan suplemen dan sebagian besar siswanya berasal dari madrasah atau sekolah umum.

Proses belajar mengajar dilakukan pada siang hari dengan jam belajar sebanyak 12 jam perminggu. Sedangkan kurikulumnya modifikasi kurikulum Departemen Agama dan kurikulum yang disusun sendiri dari sekolah/lokal.

Jumlah siswa MD Miftahul Huda sebanyak 84 laki-laki dan 83 perempuan. Jumlah kelas MDW sebanyak 9 laki dan 8 perempuan. Sedangkan jumlah siswa berdasarkan tipologi Madrasah Diniyah adalah MD suplemen/Komplemen di tingkat MDU sebanyak 159 orang dan ditingkat MDW sebanyak 11 santri. Tipologi Madin murni di tingkat MDU sebanyak 8 santri dan di tingkat MDW sebanyak 6 santri. Sedangkan asal siswa yang belajar di MD Miftahul Huda berasal dari Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung. Siswa sebagian besar berasal dari sekolah formal mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, sampai SMU.

Jumlah tenaga pengajar MD Miftahul Huda sebanyak 7 orang; 5 orang laki dan 2 orang perempuan. Pendidikan formal tenaga pengajar 3 orang sarjana S1 dan 4 orang tingkat SMA/MA. Madrasah Diniyah Miftahul Huda menempati lokasi tanah seluas 300 meter persegi, luas bangunan sebanyak 221,5 meter persegi dengan status tanah atau bangunan adalah wakaf. Kondisi bangunan MD sudah tua atau rusak ringan yang terdiri dari 3 ruang belajar, 1 ruang guru dan kantor dengan kondisi darurat, dan 1 ruang WC untuk guru dan siswa. Sarana MD yang belum dimiliki adalah ruang perpustakaan, tempat ibadah, Buku teks siswa dan alat peraga.

V. Pelayanan Pendidikan Keagamaan bagi Muslim Minoritas Tabanan

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan, keberadaan lembaga pendidikan agama di daerah mayoritas dan minoritas pemeluknya, mengalami perbedaan dalam penekanan pendidikannya. Hal ini terjadi karena lembaga pendidikan keagamaan di daerah minoritas memiliki keunikan tersendiri. Misalnya, pendidikan pesantren di Bali tidak saja memainkan peranan yang sama seperti pesantren di Jawa sebagai pencetak kader ulama, tetapi juga mencetak ulama-ulama yang tangguh dalam ilmu keislaman. Selain itu lembaga pesantren di Bali juga dijadikan sebagai institusi pelestarian identitas keislaman

yang kental di tengah-tengah komunitas Hindu yang mayoritas. Orang Islam di Bali merumuskan pendidikan ke-Islaman dalam kaitannya untuk memperkuat identitas ke-Islaman. Motivasi santri sekolah atau ke pondok pesantren adalah motivasi untuk mempertahankan identitas keislaman. Identitas tersebut salah satunya bersifat nilai moral yang mungkin berbeda dengan masyarakat Hindu.¹²

Jika ditelusuri lebih jauh, munculnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam di Bali, tidak terlepas dari peran dan kontribusi para pendatang beragama Islam dari Jawa, Madura, Makasar dan lain-lain yang datang ke Bali untuk mengais rezeki. Dengan hadirnya para pendatang ke daerah Bali, secara tidak langsung fungsi sosial lembaga Islam seperti masjid dan pesantren menjadi tempat persinggahan yang sangat penting. Seperti halnya fungsi lembaga *al-Junaid dan al-Kaff* di Singapura yang menjadi tempat singgah orang-orang Yaman yang datang ke Asia Tenggara, banyak pesantren dan Masjid di Bali menjadi tempat singgah para pendatang dari Jawa dan Madura¹³. Sambil mereka belajar di pesantren mereka melirik peluang untuk mendapatkan kerja di Bali. Sebagian ada yang sambil mengajar di pesantren atau menjadi petugas masjid untuk menunggu pekerjaan di tempat lain. Hal ini juga ditemukan beberapa santri yang belajar di PP Roudlotul Huffadz.

Memang akhirnya masjid dan pesantren menjadi tempat sosialisasi maupun tempat pertemuan antar kaum pendatang. Pada hari jum'at, masjid menjadi tempat penting untuk saling tukar pengalaman dan informasi kerja bagi orang Islam. Sementara itu pesantren juga menjadi tempat yang aman bagi pendatang untuk membiasakan diri dengan budaya Bali sambil melihat peluang pekerjaan yang mungkin dapat dikerjakan. Akibatnya banyak orang Islam di Bali cenderung taat melakukan ibadah di masjid, karena ritual dijadikan sebagai media untuk memperkuat ikatan sosial diantara mereka. Fenomena ini membuat suburnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Bali walaupun jumlah pemeluknya relatif sedikit.¹⁴

Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri Tabanan Tahun 2004 menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam di kecamatan ini masing-masing Desa adalah: Bajar Anyar 795

¹² Jajat Burhanuddin. 2006. *Mencetak Muslim Modern: Peta pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 175

¹³ *Ibid*, h. 177

¹⁴ *Loc. Cit.*

66 jiwa, Abian Tuwung 2.324 jiwa, Kediri 137 jiwa, Pondok Bandung 137 jiwa, Nyambu 12 jiwa, Kaba-Kaba 38 jiwa, Cepaka 0 jiwa, Buwit 11 jiwa, Pandak Gede 119 jiwa, Beraban 39 jiwa, Belalang 0 jiwa, Pangkung Tibah 23 jiwa, Bengkel 0 jiwa, Pejaten 263 jiwa, dan Nyitdah 670 jiwa. Jika data itu dibandingkan dengan jumlah keberadaan tempat ibadah, tempat pengajian (majelis taklim), lembaga pendidikan formal seperti sistem madrasah, dan madrasah diniyah terlihat ketidakmerataan antara jumlah umat Islam di satu desa/kelurahan dan satu desa/kelurahan yang lain dengan keberadaan institusi keagamaan tersebut. Walaupun masih hipotesa, berikut penulis gambarkan bagaimana masyarakat muslim minoritas di kecamatan Kediri Tabanan dalam mendapatkan pelayanan keagamaan termasuk pelayanan pendidikan. *Pertama*, lembaga pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah, pesantren, TKA/TPA, Majelis Taklim berada di wilayah komunitas muslimnya banyak seperti di Abian Tuwung, Banjar Anyar, Kediri. *Kedua*, desa-desa yang komunitas muslimnya sedikit hanya ada lembaga TKA/TPA yang terdapat di mushala-mushala atau di rumah ustadz. Dari data-data tersebut penulis mengasumsikan bahwa pada masyarakat minoritas akan terjadi kurangnya pelayanan pendidikan keagamaan.

Pelayanan pendidikan pada hakekatnya merupakan sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Pelayanan mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan untuk menghasilkan produk atau perilaku penyedia layanan yang dalam hal ini pengelola pendidikan Madrasah Diniyah dan pesantren yang berkaitan dengan sikap melayani seperti memberi saran atau informasi. Dengan demikian, pelayanan pendidikan keagamaan merupakan perbantuan bagi pelanggan dalam hal ini masyarakat minoritas muslim di kecamatan Kediri Tabanan.

Lembaga MD dan pesantren merupakan gabungan antara penyedia jasa dan pelanggan. Karena lahirnya MD berasal dari umat, untuk umat dan oleh umat. Kepala, guru, staf administrasi adalah kumpulan pelayanan, sedangkan orang tua murid, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya adalah kumpulan pelanggan. Jika kita melihat fenomena lahirnya MD, sulit dipisahkan satu sama lain karena misalnya seorang kepala MD, guru MD disamping sebagai penyedia layanan, mereka juga pengguna jasa tersebut dengan anaknya belajar di MD bersangkutan. Meskipun tidak mudah untuk membedakan siapa penyedia layanan dan siapa pengguna jasa dalam kasus pelayanan pendidikan MD, indikator-indikator baik buruknya

sebuah pelayanan sebagaimana telah disebutkan dapat menjadi alat analisa.

Pertama, dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren jika memiliki keandalan, yaitu kemampuan tenaga kependidikan MD dan pesantren untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan. Profil tenaga guru pada MD Miftahul Huda berjumlah 7 orang, sedangkan Pesantren Raoudlatul Huffadz sebanyak 18 orang. Dilihat dari latar belakang pendidikan di MD Miftahul Huda mereka terbilang kurang memadai sebagaimana tuntutan undang-undang. Mereka umumnya berpendidikan MA/SMA dan sebagian kecil lulusan S1. Sedangkan latar belakang pendidikan di Pesantren Roudlatul Huffadz cukup memadai karena mayoritas tenaga guru adalah lulusan S1 (11 orang) dan sisanya lulusan SMA/Aliyah/Pesantren.

Sebagian wali murid menilai bahwa keadaan guru MD Miftahul Huda dalam bidang agama cukup baik. Pendidikan agama telah memberikan peran positif terhadap anak didik di keluarga maupun di sekolah, dimana mereka memiliki kemampuan, seperti mengaji, menguasai bahasa arab, terbiasa mengamalkan ibadah dan mantap dalam bidang akidah. Drs. Sulaiman, salah seorang wali murid juga mengatakan bahwa lulusan MD Mifathul Huda dapat bersaing ketika mengikuti test ujian di pesantren di Jawa dalam hal penguasaan ilmu-ilmu agama. Bagi santri yang sekolah formal (SD,SMP), mereka sangat terbantu sekali dalam penguasaan pelajaran agama.

Hal lain yang menjadi harapan pengelola MD Miftahul Huda tentang tenaga pengajar yaitu masih minimnya kesejahteraan tenaga pengajar, sehingga ada dampak sedikit terhadap proses belajar mengajar. Belum cukupnya tenaga guru juga disampaikan para orang tua murid MD Drs. Purwanto. Memang di MD Miftahul Huda hanya ada 6 orang guru padahal kelasnya ada tiga. Menurut para orang tua murid bahwa guru MD Miftahul Huda tidak bisa tamatan Madrasah Aliyah. Guru-guru di MD ini harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat yang cukup berpendidikan baik dengan minoritas muslim maupun mayoritas Hindu. Walaupun hanya enam orang guru, pelayanan pendidikan keagamaan sudah baik dari segi kualitas.

Bagaimana ketercukupan dan keandalan tenaga guru dipesantren Roudlatul Huffadz, Drs.Sulaiman menilai keadaan ustadz/guru sudah cukup, tenaga pendidik sudah bisa melayani pendidikan. Keadaan guru di pesantren ini juga dikatakan H. Imam Mawardi cukup baik

dalam melayani pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat dari lulusan PP Roudlatul Huffadz yang telah hafal al-Qur'an 30 Juz dan terlibat aktif dalam lomba MTQ baik tingkat daerah maupun nasional, di samping menguasai kitab-kitab klasik (kitab kuning).

Pesantren Roudlotul Huffadz disamping memberikan pembinaan pendidikan terhadap para santri sebagai tugas utamanya, juga telah memberikan pelayanan berupa pembinaan baik dalam bidang ta'lim maupun ubudiyah terhadap masyarakat sekitar. Sebagaimana disebutkan oleh KH Noor Hadi, pelayanan dalam bidang *ta'lim* antara lain: pengajian majelis taklim untuk kaum bapak dan ibu, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) bagi para santri yang telah menyelesaikan/tamat TPA, Lembaga Tahfidz Qur'an, pesantren kilat, dll. Dalam bidang ubudiyah, pelayanan pesantren terhadap masyarakat di antaranya: bimbingan tilawatil Qur'an, kelompok zikir, manasik haji, perawatan jenazah, bantuan hukum/konsultasi hukum Islam, wakaf (faraid, nikah, talak), kegiatan mushalla, dan lain-lain.

Kedua, dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren jika memiliki daya tanggap, yaitu kemampuan tenaga administrasi dan atau karyawan untuk membantu masyarakat pengguna lembaga MD dan pesantren secara cepat dan bermakna. Di MD Miftahul Huda tidak ada peran khusus diposisikan sebagai tenaga administrasi. Sedangkan di PP. Roudlatul Huffadz sudah ada walaupun masih sangat minim kemampuannya.

Ketiga, dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren jika memiliki kepastian yaitu tenaga administrasi dan karyawan memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa janji yang disampaikan adalah benar akan terpenuhi. Dari indikator kedua dan ketiga pelayanan dapat dikatakan bahwa pelayanan pendidikan MD sudah tergolong baik. *Keempat*, dapat dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren, jika semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan MD dan pesantren peduli atau bisa memberikan perhatian secara individual kepada pengguna lembaga.

Kelima, dikatakan baik pelayanan pendidikan MD dan pesantren jika fasilitas-fasilitas kependidikan bisa dilihat mulai dari fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan komunikasinya. Umumnya para orang tua murid mengatakan bahwa untuk daerah minoritas, fasilitas-fasilitas kependidikan MD dan pesantren sudah memadai. Namun, mereka berusaha bersama-sama dengan penyelenggara MD dan pesantren

untuk menambah ruang belajar, menambah ruang mushola, melengkapi fasilitas buku pelajaran dan merenovasi ruang-ruang yang sudah rusak.

VI. Harapan Muslim Tabanan terhadap Pelayan Pendidikan Keagamaan

Harapan adalah ambisi dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang dimiliki saat ini, atau keinginan untuk meraih cita-cita. Keinginan yang kuat dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang kurang diminatinya, semata-mata demi terwujudnya hal-hal yang diinginkan. Setiap orang memiliki tingkat keinginan sendiri, yaitu tingkat yang diinginkan dapat tercapai. Biasanya, tingkat harapan yang realistis adalah yang sepadan dengan kemampuan sendiri dan keadaan seperti ini memberikan peluang yang lebih besar untuk tercapainya hal-hal yang diinginkan. Jika seseorang mempunyai tingkat harapan yang jauh di atas kemampuannya, besar kemungkinan bahwa ia akan gagal dan mengalami frustrasi. Seseorang yang kurang berani menghadapi kegagalan cenderung untuk mempunyai tingkat harapan yang rendah.¹⁵

Setidaknya kerangka definisi di atas dapat digunakan dalam menggambarkan harapan masyarakat muslim minoritas di Kecamatan Kediri Tabanan. Dari beberapa informan seperti tokoh masyarakat, dan orangtua murid diketahui adanya keinginan dan harapan terhadap lembaga Pesantren dan MD.

A. Bentuk Lembaga Pendidikan Keagamaan

Berdasarkan wawancara, para tokoh ulama, ormas Islam maupun wali murid santri sangat membutuhkan kehadiran lembaga pendidikan keagamaan yang memadai; mulai dari tingkat pendidikan formal seperti RA/TK Islam, MI, MTs, dan MA. Mereka berharap lembaga pendidikan keagamaan ini memiliki kualitas yang lebih baik dari segi sumber daya manusia (tenaga pengajar), sarana prasarana, manajemen lembaga dan output lulusannya.

H. Shohib, salah satu tokoh muslim masyarakat Tabanan berharap agar lembaga pendidikan keagamaan di pondok pesantren lebih memfokuskan pada penguatan *tafaquh fiddin* (ilmu-ilmu alat dan tahfidzul Qur'an). Hal senada juga diamini oleh Drs. Sulaiman, wali murid dan

¹⁵Dikutip dari Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1988. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, Jilid 2, h. 373.

seorang tenaga pengajar di SMKN Tabanan, mengharapkan agar pendidikan di MD dan pesantren lebih memprioritaskan pada pendidikan agama yang lebih mendalam lagi dalam rangka membentengi umat Islam dari pengaruh iman (keyakinan) dan budaya dari luar.

Mereka juga berharap agar Madrasah Diniyah tidak perlu diformalkan. Mereka berpendapat apabila Madrasah Diniyah berubah menjadi formal maka akan memperlemah lembaga pendidikan agama yang sudah ada (berdiri), seperti MI dan MTs. Hal lain yang menjadi alasan adalah karena sebagian besar siswa MD berasal dari sekolah formal (SD/MI, SMP/MTs). Jika MD diformalkan, mereka menilai MD tidak akan laku lagi, karena adanya pengulangan mata pelajaran umum yang telah diajarkan di sekolah. Menurut Drs. Sulaiman, boleh saja MD diformalkan apabila siswa-siswinya hanya belajar di diniyah/ tidak sekolah formal.

Harapan masyarakat lainnya terhadap bentuk-bentuk pendidikan keagamaan, yaitu adanya lembaga pendidikan yang dapat menampung seluruh lapisan masyarakat mulai dari usia dini sampai lanjut usia seperti TPA/TPQ bagi anak-anak usia dini, MD, majelis taklim, pondok pesantren, hal ini akan dapat menjamin pembinaan dan pelayanan ummat Islam secara baik dan berkualitas.

B. Jenis Pendidikan Keagamaan

Tekait dengan jenis pendidikan keagamaan yang diharapkan, para tokoh masyarakat, pimpinan ormas NU, Muhammadiyah, MUI, mengharapkan bahwa jenis pendidikan keagamaan yang sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas utama adalah pendalaman/penanaman nilai-nilai agama terutama dalam bidang *akidah*. Mereka berpandangan bahwa dengan penanaman akidah yang kuat diharapkan ummat Islam dapat membentengi imannya ditengah-tengah kehidupan sekitar. Kemudian jenis pendidikan tentang pendidikan baca tulis al-Qur'an, praktek ibadah (shalat, puasa, zakat, haji) dan sebagainya.

H. Isro'i, SAg (Kabid Pendais dan PK Pontren Kanwil Depag Propinsi Bali) dan Drs. HM Shaleh (Ketua MUI Kabupaten Tabanan) menekankan perlunya penanaman nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basariyah* (kesalehan lokal/sosial) di kalangan warga muslim, melalui pemahaman nilai-nilai kesalehan sosial ini diharapkan warga muslim Bali dapat memahami perbedaan yang ada sehingga dapat memperkuat rasa persatuan sebagai bangsa, sesama

warga Indonesia, juga agar umat Islam lebih bijaksana dalam menyampaikan ajarannya di lingkungan mayoritas beragama Hindu.

C. Sarana Prasarana

Sebagai masyarakat yang relatif sedikit pemeluknya, pada umumnya mereka mendambakan lembaga pendidikan Islam yang lengkap mulai dari sarana dan prasana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Kediri. Beberapa tokoh agama dan wali santri mendambakan sarana gedung yang permanen baik gedung maupun sarana belajar lainnya. Menurut tokoh masyarakat Kediri, Drs. Purwanto, masyarakat di Tabanan menginginkan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki fasilitas yang memadai mulai dari sarana, tenaga dan fasilitas lainnya, karena dengan fasilitas yang baik akan cepat menyerap pelajaran bagi para anak didik/siswa.

Dalam bidang kurikulum, pada umumnya masyarakat mengharapkan kurikulum yang digunakan adalah dalam bentuk kurikulum kombinasi yakni kurikulum yang tidak hanya berasal dari pemerintah (Depag) saja tetapi juga ada kurikulum dari yayasan/lokal dengan memperhatikan tuntutan perkembangan zaman/merespon perkembangan zaman dan wilayah yang ada, hal ini penting dalam rangka memperkuat identitas keislaman bagi warga muslim yang minoritas di Bali.

VII. Penutup

A. Kesimpulan

1. Implementasi pelayanan pendidikan keagamaan madrasah diniyah, pesantren di minoritas muslim Tabanan hampir seluruhnya atas inisiatif masyarakat muslim Posisi pemerintah dalam hal ini Kasi yang membidangi urusan keagamaan Islam di Kandepag sebagai fasilitator
2. Secara umum seluruh masyarakat minoritas muslim telah dapat terlayani dalam pendidikan keagamaan dari usia dini sampai orang tua, walaupun masih terbatasnya sarana-prasarana, kurangnya kesejahteraan tenaga guru, tetapi itu semua tidak mengurangi semangat masyarakat muslim untuk belajar agama.
3. Bentuk bentuk pelayanan pendidikan keagamaan di daerah Tabanan mulai dari usia dini sampai orang tua, yaitu berupa TKA/TPA bagi

usia dini dan anak sekolah Dasar (SD/MI), Majelis taklim (Remaja/Pemuda, kaum bapak dan Kaum Ibu) Madrasah Diniyah (Awaliyah, Wustho dan ‘Ulya), dan Pondok Pesantren.

4. Harapan masyarakat muslim sebagai minoritas menginginkan pelayanan pendidikan keagamaan yang berkualitas. Sedangkan hambatan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan keagamaan di masyarakat minoritas, seperti masih sulitnya mendirikan tempat ibadah/pendidikan dan mahalnnya tanah di Bali.

SUMBER BACAAN

- Abdullah, Taufik (1987): *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor
- Azra, Azyumardi (2005): *Wacana tentang Minoritas Muslim*, dalam Kata Pengantar Buku M Ali Kettani “*Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*,
- Burhanuddin, Jajat (2006): *Mencetak Muslim Modern: Peta pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan – 1
- Fata, Ahmad Choirul, *Anak Tiri itu Bernama Madrasah*, Republika, 13/2/20
- Kettani, M. Ali (2005): *Muslim Minoritas di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Kabupaten Tabanan Dalam Angka Tahun 2004/2005, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan.
- Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI (2005), *Studi Kelompok Keagamaan Minoritas di Berbagai Daerah*,
- Rahim, Husni (2001): *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Saidi, HM Shaleh (1996): *Perkembangan Akulturasi Islam dan Hindu di Bali*, Dalam Aswab Mahasin (ed.); *Rub Islam Dalam Budaya Bangsa*: Jakarta, Yayasan festival Jakarta,
- , dan Drs. Yahya Anshori (1979): *Sejarah Keberadaan Ummat Islam di Bali*, Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan MUI propinsi Bali bekerjasama dengan Pemda Tk.I Bali
- Yaqin, M Ainul (2005): *Pendidikan Multi Kultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Pilar Media, Yogyakarta,
- Wirawan, AA Bagus (1996): *Akulturasi Islam-Hindu; Tinjauan Historis*, dalam Aswab Mahasin (ed.) *Rub Islam Dalam Budaya Bangsa*: Jakarta, Yayasan festival Jakarta,